

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DITINJAU MENURUT
PENDAPAT IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**



**OLEH
BUDI UTAMI
10622003731**

PROGRAM : S1

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DITINJAU MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I**. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa zakat merupakan salah satu tiang pokok ajaran Islam yang 4 tiang pokok lainnya yang wajib ditegakkan ditengah-tengah kaum muslimin. Salah satu tujuan dari zakat tersebut adalah memberi kemaslahatan bagi *muzakki* dan *mustahiq*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut banyak cara yang dilakukan salah satunya dengan adanya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah mengenai perencanaan, pengumpulan zakat, pendistribusian, serta mengawasi zakat. Kalau kita lihat seandainya zakat ini dikelola secara optimal dan kesadaran membayar zakat itu sudah menyeluruh apalagi masyarakat umat islam di Indonesia beragama islam. Sebagaimana dalam pasal 12 dikatakan bahwa petugas akan mengambil zakat bila diberitahu oleh *muzakki*, ini berarti UU tersebut tidak memiliki kekuatan untuk memaksa para *muzakki* untuk membayar zakat.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan bagaimana Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Untuk menjelaskan bagaimana Pengelolaan zakat menurut Imam Syafi'i, Untuk menganalisis pengelolaan zakat menurut Imam Syafi'i dan UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kegunaannya adalah bias menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang meliputi UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*, yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya. Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Komparatif*, metode pengumpulan datanya adalah data primer dan data sekunder, metode penulisannya adalah Deduktif dan Induktif, subjek dalam penelitian ini adalah Imam Syafi'i dan pemerintah dan objeknya adalah tentang pengelolaan zakat. dan penelitian ini menganalisis apakah Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i

Dari analisis yang telah penulis lakukan, maka Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Tetapi Undang-Undang tersebut perlu adanya revisi ketegasan petugas dalam mengambil zakat dari *Muzakki* (orang yang berhak zakat) dan sanksi bagi orang yang enggan membayar zakat. tidak hanya sanksi bagi pengelola saja, tapi perlu adanya sanksi bagi yang enggan membayar zakat. Sehingga Undang-Undang tersebut memiliki daya paksa dalam rangka tercapainya tujuan zakat itu sendiri.

Hadirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat juga memberikan spirit agar pengelola zakat di tangani oleh pemerintah atau wali seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Dengan lahirnya UU ini, diharapkan dapat menambah pemahaman baru tentang zakat, yang selama ini masyarakat hanya memahami petugas zakat hanya menerima dan mendistribusikan zakat.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan MasaLah	9
C. Permasalahan.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II : BIOGRAFI IMAM SYAFI'I	
A. Nasab dan Lahirnya Imam Syafi'i	14
B. Pendidikan dan Aktifitas Imam Syafi'i	16
C. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Syafi'i.....	24
D. Karya_karya Imam Syafi'i	27
 BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat.....	31
B. Hukum dan Syarat Zakat.....	34
C. Harta Yang Wajib Dizakati	40
D. Siapa yang Wajib Menerima Zakat	46
E. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	47

**BAB IV : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DITINJAU MENURUT PENDAPAT IMAM
SYAFI'I**

A. Profil UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.....	50
B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat	55
C. Pengelolaan Zakat Menurut Imam Syafi'i	59
D. Analisis undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ditinjau menurut pendapat imam syafi'i	64

BABV : KESIMPULAN DAN SARAN

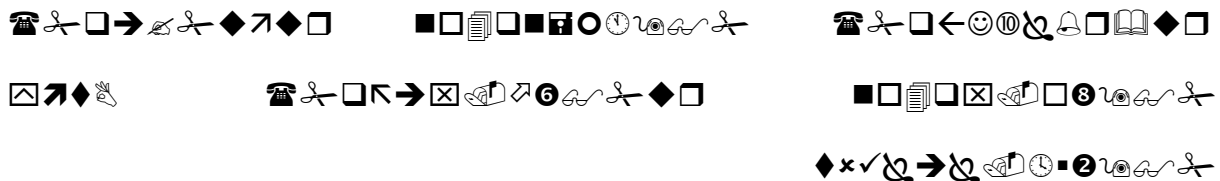
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut bahasa artinya suci, tumbuh, berkembang, berkah. Sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.¹ Zakat adalah ibadah amaliyah ijtimaiah yang memiliki posisi yang sangat penting strategis dan sangat menentukan². Zakat merupakan satu tiang pokok ajaran Islam yang lima (sahadat, shalat, puasa, zakat haji) yang merupakan satu kesatuan bangunan yang mestinya di tegakkan ditengah-tengah kaum muslimin, karena jika salah satu dari tiang ajaran tersebut ditinggalkan menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam diri seseorang, yang tentu akan membawa dampak negatif. Karena itu khalifah Abu Bakar mengambil tindakan tegas dengan memerangi orang yang enggan membayar zakat.³ Zakat termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan shalat.⁴ Firman Allah dalam surat al-baqarah : 43



Artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S al-Baqarah : 43).⁵

¹ M Ali hasan, *Masail Fiqih*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke 2 h. 1

² Yusuf Qardawi, *Terjemahan Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta : Akbar, 2005), cet. ke 1 h. 316

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Nusantara, 1999) cet. ke 5 h. 39

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003) cet. ke 2 h. 45

⁵ Depag RI. *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), cet. ke 1 h. 16

Sebagai suatu ibadah dan juga merupakan salah satu rukun dari rukun Islam (rukun islam yang ke-3), kedudukan zakat di tengah-tengah umat sangat tidak bisa dinafikan dan dianggap penting kehadirannya. Zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat. Pertama, zakat merupakan perintah Tuhan sehingga mengerjakannya adalah sebuah ibadah (hablum minallah), yang kedua juga mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat (hablum minannas).

Sasaran pembagian zakat secara konvensional tegasnya yang telah disepakati ulama, baik klasik maupun modern, terdiri dari delapan golongan. Hal ini mengacu pada Firman Allah :

لَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الْمَنَافِقِ وَلَا إِلَى الَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ دِينَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ يَفْسِدُونَ زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ
 وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ
 وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ
 وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ
 وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ
 وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ
 وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ وَلَا تُؤْتُوا زَكَاتَكُمْ إِلَى الَّذِينَ يَفْسَدُونَ بِهَا زَكَاتَكُمْ فَهُمْ لَا يُغْنَوْنَ عَنْكُمْ

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS at-Taubah : 60).⁶

Dewasa ini pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi problem tersendiri tentang efektifitas dan manfaat dalam penyaluran zakat tersebut, seperti yang dilangsir H. M. Djamal Doa yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Periode 1999-2004 Komisi V dan juga sebagai anggota panitia anggaran, ia mengatakan bahwasanya selama ini zakat dianggap sebagai suatu amal pribadi yang disalurkan secara intensif guna memenuhi kebutuhan

⁶ Ibid h. 123

konsumtif. Tegasnya proses penyaluran zakat hanya sebatas difungsikan sebagai ajaran pembersih harta dan jiwa bagi kalangan orang muslim yang mempunyai taraf ekonomi mampu, sehingga penyalurannya sebatas pemenuhan kebutuhan konsumtif untuk kaum muslim yang kurang mampu.⁷

Berangkat dari pemikiran di atas, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara rapi dan profesional maka zakat memang benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif perumusan undang-undang pengelolaan zakat apabila dilacak dalam penjelasan, terlihat mengidealkan pengelolaan zakat yang profesional, bertanggung jawab, berkepastian hukum dan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dana pendistribusian serta pendayagunaan zakat⁸.

UU no. 38 tahun 1999 adalah UU yang mengatur tentang pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan serta pengawasan zakat⁹. UU ini terdiri dari 10 Bab dan 25 pasal.

⁷ [http://www. Geoogle.co.id/seartch/client=fifefox-a&rls=org.mozela%3AenUS%=zakat=&btnG=enelusura+geoogle](http://www.Geoogle.co.id/seartch/client=fifefox-a&rls=org.mozela%3AenUS%=zakat=&btnG=enelusura+geoogle). Unduh 10 Juli 2010 jam 20.15 WIB

⁸ UU RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat (Yogyakarta : Pustaka Yustasia, 2009).cet. ke 1 h. 7

⁹ Undang-Undang. *loc.cit*

Lahirnya UU ini didorong oleh kenyataan bahwa hingga saat zakat belum difungsikan secara maksimal untuk merealisasikan tujuan sosial ekonomi yang antara lain untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan cita-cita syari'at zakat itu sendiri, zakat dapat menjadi alternatif pemerintah ekonomi bila dikelola dengan baik ia merupakan potensi besar yang belum digali secara maksimal. Bisa dibayangkan jika kesadaran membayar zakat sudah menyeluruh dikalangan umat Islam, maka akan sangat banyak dana terkumpul yang bisa dilakukan untuk membangun sarana yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi umat.

Zakat menurut UU adalah harta yang wajib didirikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya¹⁰.

Menurut Imam Syafi'i, Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara dan waktu yang khusus. Yang dimaksud waktu yang khusus adalah sempurnanya kepemilikan dalam satu tahun (haul) dan ukurannya (nisab).¹¹

Menurut Imam Syafi'i pengumpulan zakat harus berupa barang yang di zakati itu sendiri, kecuali untuk barang dagangan. Artinya untuk hasil bumi, maka yang harus dizakatkan harus barang bumi itu sendiri, pengumpulan zakat tidak bias diganti dengan uang meski senilai dengan barang yang di zakati. Namun untuk barang dagangan, zakat harus

¹⁰ *Ibid.* h. 7

¹¹ Wahbah al- Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997) cet.ke 3, h. 84

berupa uang, pedangang konversi misalnya, tidak boleh mengeluarkan uang dalam bentuk barang-barang konversi, seperti baju, celana dan barang lainnya.¹²

Lembaga Islam yang mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat hendaklah ditangan oleh orang-orang yang beriman, berilmu, berakhlak mulia dan berketerampilan manajemen yang modern.¹³

Akan tetapi dalam perkembangannya seperti yang dikatakan oleh Djamel Doa, Undang-Undang ini masih memiliki kelemahan yang mendasar di sana-sini. Sebagai contoh dalam Pasal 12 undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini disebutkan kalau petugas akan mengambil zakat bila diberi tahu oleh muzakki¹⁴. Ini berarti undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa (force power) untuk mengambil zakat dari muzakki, padahal jika dilihat dalam sejarah, pada masa Abu Bakar r.a. perang terhadap orang yang enggan membayar zakat malah menjadi prioritas utama beliau. Sebagaimana Sabda Nabi

فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتَرُدَّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ

Artinya “Kalau mereka memperkenankan engkau, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka wajib zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan dikembalikan dari orang-orang miskin dari mereka”¹⁵.

Kemudian dalam pasal 14 ayat 3 di katakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak

¹² al-Imam Asy-Syafi'i.R.A, *Terjemahan al-Uum*, (Malaysia : Victory Agencie, 1989), cet. ke 1 h. 22

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1994), cet. ke 7 h. 266

¹⁴ Undang-Undang No. 38 pasal 12. *op.cit.* h. 11

¹⁵ al-Imam Asy-Syafi'i.R.A, *op. cit.*, h. 2

dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶.

Imam Syafi'i membenarkan memungut dana selain zakat kepada rakyat yang mampu, tetapi antara zakat dan pajak mempunyai perbedaan, sehingga antara zakat dan pajak tidak boleh disamakan¹⁷.

Perbedaan cara pandang antar seorang ulama muslim dengan muslim lainnya dalam mengimani pajak akan berimbas kepada cara penghitungannya, artinya bila kesepakatan mengatakan bahwa zakat sama dengan pajak, maka implikasinya adalah seorang muslim tidak perlu lagi membayar zakat setelah membayar pajak¹⁸.

Menurut Imam Syafi'i tanah yang kena pajak tetap dikenakan 10% sebagai zakat. Pajak untuk tanah sedangkan zakat untuk penghasilan¹⁹.

Asas tempat berpijak zakat dan pajak adalah jauh berbeda. Zakat dasarnya firman Allah dan pajak hasil rumusan manusia berdasarkan kebijakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Di samping itu, lemahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat juga disebabkan oleh masalah kepercayaan terhadap proses pengelolaan zakat.

¹⁶ Undang-Undang No. 38. *op.cit.*, h. 11

¹⁷ Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke 3 h. 29-30

¹⁸ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana,2006),cet. ke 1 h. 41

¹⁹ Ach Khudori Soleh, *Fikih Kontekstual*,(Jakarta: PT Pertja, 1999), cet. ke 2 h. 12

Seperti yang telah diuraikan penyusun di atas permasalahan zakat dalam hal teknis menjadi problem ikhtilaf di kalangan ulama dalam penentuan hukumnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini banyak terdapat bahasa yang hanya mengacu kepada hukum agama akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci Sebagai contoh dalam pasal 11 ayat 3 UU no 38 tahun 1999 dikatakan bahwa penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Apabila hal ini tidak dijelaskan hal ini akan berdampak pada kerancuan ataupun terjadi derivasi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang berimplikasi terhadap undang-undang yang bisa ditafsirkan sebebas-bebasnya (poly Interpretate), yang pada akhirnya undang-undang tersebut menjadi tidak pasti dan tidak mengikat. Oleh karena itu penyusun ingin mengkaji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dan terarahnya penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan suatu masalah yang akan diteliti. Peneliti ini menitik beratkan pada masalah pengumpulan zakat yaitu : **Analisis Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ditinjau menurut Pendapat Imam Syafi'i.**

C. Permasalahan

Bertitik tolak dari batasan masalah diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem Pengelolaan zakat menurut UU no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
2. Bagaimana sistem Pengelolaan Zakat menurut Imam Syafi'i
3. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ditinjau menurut pendapat Imam Syafi'i.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan bagaimana Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
2. Untuk menjelaskan bagaimana Pengelolaan zakat menurut Imam Syafi'i
3. Untuk menganalisis pengelolaan zakat Imam Syafi'i dan UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolan zakat

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang melingkupi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dalam khazanah intelektual terhadap kajian zakat khususnya di jurusan Muamalah.

3. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di fakultas syari'ah UIN SUSQA Pekanbaru dalam mencapai gelar sarjana S1 Dalam bidang Muamalah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau yang lebih sering dikenal dengan *library research*. Yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif Comperatif, yaitu memberikan penilaian terhadap suatu tulisan dan pemikiran tokoh yang berkenaan dengan kajian yang diteliti secara jelas, sistematis dan subjektif mungkin tanpa mengurangi keilmiahannya. Kemudian dianalisis dan dikaji secara normatif, yaitu dengan fiqh Imam Syafi'i sebagai tolak ukurnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Bahan-bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Bahan pustaka yang menjadi rujukan primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang Imam Syafi'i, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Adapun rujukan sekunder fokus kajiannya mengenai permasalahan zakat dan juga bahan pustaka lain yang berkaitan dengan zakat. penyusun juga menggunakan buku-buku yang lainnya yang bisa dijadikan sumber acuan yang terkait dengan Skripsi ini.

4. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini metode penulisannya adalah:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengemukakan keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum, dianalisa dan diambil kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- b. Induktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan secara umum dari data-data tersebut

5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Imam Syafi'i dan Undang-Undang NO. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Tentang pengelolaan zakat.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif. Yang dimaksud dengan penalaran deduktif di sini adalah hukum-hukum yang sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meninjau sistem pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dari setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan dalam pembahasan ini mencakup latar belakang, batasan masalah, masalahan,Tujuan dan kegunaan, Metode penelitian, Sistematika penulisan

Bab II : berisikan gambaran umum, bab ini mengulas secara garis besar Biografi Imam Syafi'i, Lahirnya Imam Syafi'i, Pendidikan Atau Aktifitas Imam Syafi'i, Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Syafi'i, Karya-Karya Imam Syafi'i, Kitab Imam Syafi'i, Karya Imam Syafi'i,

Bab III : Berisikan tentang zakat secara umum dalam hukum Islam termasuk di dalamnya tentang pengertian zakat, hukum dan syarat-syarat zakat, siapakah yang wajib membayar dan menerima, hukum Orang yang enggan membayar zakat

Bab IV : Berisikan analisis UU No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang ditinjau menurut pendapat Imam Syafi'i.

Bab V : Kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Nasab dan Kelahiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i di lahirkan di Asqalan, suatu tempat yang jauhnya kurang lebih 3 Farsah dari Ghazzah. Di samping itu ada juga yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Ghazzah, Palestina tidak jauh dari Bait al-Muqaddas sebagaimana pengakuan beliau di dalam *al-Umm*.¹ Tetapi ini tidaklah mengindikasikan suatu perbedaan, sebab Ghazzah dulunya adalah daerah Asqalan.² Disamping itu ada juga yang meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i di lahirkan di Yaman.

Imam Syafi'i di lahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H(787)³. An-Nawawi berkata bahwa imam Syafi'i di lahirkan pada malam Abu Hanifa meninggal dunia⁴. Selain itu kelahiran beliau juga berketepatan dengan wafatnya mufti Hijas, yaitu Ibnu Juraid al-Makky. Dengan demikian ahli sejarah meramalkan bahwa pribadi imam Syafi'i kelak akan menggantikan kedudukan imam besar tersebut tentang kelahiranan pengetahuannya.⁵

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf

¹ Imam Syafi'i, *op.cit.* h. 3

² Sirajuddin Abbaz, *Sejarah Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah 1995), cet. ke 7, h. 13

³ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i Hanbali*, (Jakarta : Bulan Bintang 1996), cet. ke 3 h. 149

⁴ Ahmad Syurbasi, *Al-Aimmatul Arba'ah, terj. Sabil Hud*, H A. Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara 1991), cet. ke 2 h. 142

⁵ Munawir Chalil. *op.cit.*, h. 149-150

bin Qushay al-Qurasy.⁶ Melihat dari nasabnya ini jelaslah bahwa beliau seorang Qurais yang berasal dari bani Hasyim. Sedangkan dari pihak ibu pertalian nasabnya adalah Fatimah binti Abdillabhin al-Hassan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.⁷ Imam Syafi'i dilahirkan dalam keadaan yatim ayah dan ibu beliau termasuk keturunan Qurais yang miskin dan keluar dari kota Mekkah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Madinah. Akan tetapi karena suatu keperluan ayahnya membawa mereka ke Ghazzah dan ia meninggal di sana. Ibunya tidak mampu bertahan hidup di Ghazzah kemudian membawa anaknya ke Asqalan. Karena kehidupan mereka tidak juga semakin membaik maka pada usia beliau 2 tahun, ia dibawa ibunya ke Mekkah, yaitu kampung nenek moyangnya dengan harapan mereka akan mendapat harta dari Zawil Qurba. Tapi bagian dari Zawil Qurba tersebut sangat kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan mereka. Dari kecil imam Syafi'i telah terbiasa akan kehidupan yang sangat sederhana dan kadang-kadang selalu menderita kesulitan.

B. Pendidikan Atau Aktifitas Imam Syafi'i

Dengan berbekal otak yang luar biasa disertai semangat kesungguhan menuntut ilmu, Syafi'i dalam masa mudanya dengan mudah mencerna seluruh ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Dalam usia relatif muda (lebih kurang 15 tahun), gurunya Muslim bin Khalid az- Zanjil telah memberikan kebebasan berfatwa. Namun walaupun demikian ia akan tetap haus akan ilmu pengetahuan disamping mengeluarkan fatwa-fatwanya⁸.

Ketika Syafi'i menginjak usia anak-anak ia di didaftarkan oleh ibunya untuk belajar di sebuah lembaga pendidikan di Mekkah. Saat itu beliau tidak mendapatkan uang untuk

⁶ Huzaimah tahido yangga, *Pengantar Perbandingan Mashab*, (Jakarta : logos,1997), cet. ke 1, h.121

⁷ Huzimah Tahito Yangga. *loc.cit*

⁸ Abdurrahman As-Syarqawy, *Aimatul Fiqhi at-Tis'ah,terj.*Mujio Nurchalis,(Bandung : al-Bayan, 1994), cet. ke-1,h. 121

membayar gurunya. Ketika itu Syafi'i tahu bahwa gurunya tersebut tidak mampu untuk mengajar anak-anak yang banyak jumlahnya. Maka melihat sang guru mengajar Syafi'i merasa menguasai sebuah apa yang diajarkan kepada anak-anak itu. Atas persetujuan gurunya itu ia mempraktekkan seluruh ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Gurunya pun tidak minta upah darinya. Dengan cara inilah Syafi'i dapat menyelesaikan studynya sampai ia dapat menghafal al-Qur'an dan menamatkan pelajarannya pada usia tujuh tahun. Setelah itu ibunya mengarahkannya untuk mempelajari tilawah, tajrit, dan tafsir al-Qur'an pada ulama di Masjidil Haram.

Masa remaja Imam Syafi'i dihabiskan dengan hidup bersama masyarakat suku Hudzail untuk memperdalam bahasa Arab, syair, budaya, kesusastraan dan berbagai tradisi atau adat istiadat bangsa Arab. Tahab ini juga melahirkan dua potensi bagi karirnya di masa mendatang, yaitu pertama berbagai manfaat ia dapatkan dari intradisi langsung dari komunitas suku pedalaman Hudzail yang modern itu. Kedua, petualangannya ke pedalaman suku Hudzail telah membentuk karakteristik yang kuat, maka pada tahab ini berperan penting sebagai barometer bagi tahab-tahab selanjutnya yang dijalani Syafi'i⁹. Kepandaiannya dalam mengarang dan menyusun kata-kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah para ahli kesusastraan Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair yang datang belajar kepada beliau¹⁰. Ia juga termasuk penyair dan penulis prosa yang enak dibaca, seerhana tapi jelas, dan kaya dengan muatan pikiran¹¹.

⁹ Muhyiddin Abdussalam, *Muakif Imam Syafi'i Min Madrasath al- Iraq al-Fiqhiyyah*. terj. Mahrus Muslim, (Jakarta: Fika hati Anesta.1995), cet. ke 1 h. 21-22

¹⁰ Ali Hasan. *Perbanding Mazhab*, (Jakarta: raja grafindo persada.1995) cet. ke 2 h. 206

¹¹ Husain Ahmad Amin. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*. (Bandung, PT. Rosa Karya, 1999) cet. ke 4, h. 6

Masa dewasa Imam Syafi'i penuh dengan perjalanan dan perkenalan dengan berbagai pusat yurisprudensi Islam di Mekkah. Sehingga sikap hidup dan kepribadianya terbentuk dengan kuat dan mantap. Selain itu pola pikir dan wawasan pandangannya terkesan jauh kedepan. Sebagai contoh ia mengenal corak fiqh di Madinah dan guru besar Imam Malik, aliran fiqh Mekkah dari Muslim Bin Khallid Az-zanji dan Sofyan bin Uyanah. Mendalami Fiqh Sya dari Amir bin Slamah (Murid al-uaza'i), mempelajari fiqh Mesir dari Yahya ibu Hasan dan murid al-Latsi. Belajar fiqh Iraq dari Muhammad bin Hasan (murid Abu Hanifa) dan fiqh Yaman dari Matraf bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf.

Kemauan keras Imam Syafi'i untuk memperdalam ilmu pengetahuan telah membuatnya berpindah-pindah dari satu kotake kota lain. Meskipun ia telah hafal Muwaththa'-nya Imam Malik di usia sepuluh tahun ia belum puas sebelum bertemu langsung dengan Imam tersebut. Maka berangkatlah ia ke Madinah dan berguru selama delapan tahun. Karena kecerdasan dan ketajaman Imam Syafi'i dalam mempelajari kitabnya ia mendapat keistimewaan dari Imam Malik untuk mengajarkan kitabnya kepada murid-murid Imam Malik lainnya. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, al-fakhru mencatat bahwa para ulama yang diserap ilmunya oleh Imam Syafi'i jumlahnya puluhan. Antara lain disebutkan 19 ulama yakni 5 orang dari Mekkah, 6 dari Madinah, 4 dari Iraq. Berbagai dokumen mencatat bahwa kehidupan Imam Syafi'i secara keseluruhan tak obahnya seperti lingkaran mata rantai yang tiada putus. Di mana antara proses belajar dan mengajar, member dan menerima merupakan dua dokumen yang sangat kohesif baginya¹².

¹² Muhyidin Abi Salam, *op.cit.*, h. 24

Demikianlah lengkap perjalanan ilmiah yang dilakukan Imam Syafi'i dalam rangka menggali ilmu pengetahuan agama tanpa putus selama 36 tahun. dari satu daerah ke daerah lain dengan memilih likalitas sasaran sebagai sasaran kajiannya.

Setelah dua tahun di kota Bagdad dalam usia 22 tahun Imam Syafi'i berangkat ke Kuffah dan Bagdad, yaitu kekhalifahan Abbasiyah yang pada saat itu di pimpin oleh Abu Ja'far al Mansur pengganti dari Harun ar-Rasyid. Dalam kesempatan ini beliau bertemu dengan murid-murid dan sahabat Abu Hanifa, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dari mereka inilah beliau mengetahui mazhab Hanafi.

Pengembaraan beliau kemudian di lanjutkan ke Persia dan terus ke Rmlah (pelestina) sehingga beliau mengetahui kehidupan bangsa yang bukan Arab lagi. Setelah dua tahun meninjau tempat-tempat tersebut maka ia kembali ke guru besarnya yaitu Imam Malik di Madinah. Karena keagungannya kepada Imam Syafi'i ia mengizinkan Imam Syafi'i untuk berfata sendiri dalam ilmu fiqh dan tidak lagi atas nama mazhab Maliki. Ia tinggal bersama Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 176 H. jadi secara keseluruhan Imam Syafi'i menuntut ilmu dari Imam Malik selama 7 tahun yakni dari tahun 170-172 H dan 174-179¹³.

Setelah guru besarnya wafat Imam Syafi'i pergi ke Yaman dan menjadi mufti di sana dengan izin wali negeri tersebut. Selain itu beliau juga menuntut ilmu kepada Syekh Yahya bin Husen, selain sebagai seorang mufti ia juga di angkat sebagai wali daerah Najran dan menikah dengan seorang putrid Yaman yang bernama Hamidah binti Nafi. Seorang putrid keturunan Utsman bin Affan. Sahabat dan khalifat nabi yang ke tiga. Usia beliau sewaktu

¹³ Sirajudin Abbas. *op.cit.*, h. 23-25

menikah lebih kurang 30 tahun, dari pernikahan beliau mendapat 3 orang anak, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Anak beliau yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i kemudian menjadi ulama besar pula dan menjadi qadhidi Jazirah (wafat 240 H)¹⁴.

Ketika beliau diyaman, ada sebuah fitnah yang menyebabkan beliau di tangkap dan di hadapkan ke khalifah Harun ar-Rasyid. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i mengembangkan faham Syi'ah dan hal itu sangat di benci di Abbasiyyah. Arena kekaguman khalifah atas ketajaman pemikiran beliau akhirnya beliau di bebaskan dari tuduhan fitnah tersebut¹⁵.

Tidak lama setelah beliau kembali ke Mekkah dan tinggal di sana dan menaburkan ilmunya terutama kepada orang-orang yang menuntut ilmu sambil menunaikan ibadah haji. Selama 17 tahun beliau di Mekkah belum pernah merasa bahwa beliau adalah seorang mujtahid mutlak, sehingga fatwa-fatwa beliau masih banyak terkait dengan pemikiran guru-guru beliau. Setelah beliau hijrah ke Bagdad, yakni sepeninggalan Harun ar-Rasyid, barulah beliau mulai membentuk sebuah pemikiran tersendiri yang dikenal sebagai mazhab Syafi'i. hal ini ditandai dengan dikarangnya kitab *ar-Risalah*, yakni kitab *usul fiqh* yang pertama dikarangnya. Dan fatwa-fatwa beliau selama di Iraq ini sering di sebut sebagai qaul qadhim.

Pada bulan Syawal 198 H, imam Syafi'i hijrah kemesir dan di sana ia tinggal bersama seorang ulama yang pernah menjadi muridnya di Madinah. Ia tinggal di sana sampai tahun 204 H¹⁶. hal pertama yang ia lakukan ketika menetap di Mesir adalah menziarahi makam Imam al-Latsi. Pada halaqah-halaqah yang di lakukan di masjid Jami' Amr ketika itu, beliau

¹⁴ *Ibid.* h. 25-26

¹⁵ *Ibid.* h. 26-29

¹⁶ *Ibid.* h. 31-32

melaksanakan tradisi yang baru dengan memulai sedikit pelajaran dan melangsungkan diskusi antara ustad-ustad dengan murid-muridnya. Meskipun Imam Syafi'i merasakan kebebasan berkreasi di Mesir karena lebih longgarnya pemakaian ra'yu dan kecintaannya masyarakat di sana pada sya'ir, beliau di hadapkan pada orang-orang yang mengaku sebagai ahli Maliki dan menyombongkan diri di hadapan mereka. Mereka menuduh Imam Syafi'i dan pengikutnya tidak mengetahui hadis, namun hal itu ditentang dengan kesaksian Ahmad bin Hambal bahwa tidak ada orang yang lebih mempertahankan sunnah selain beliau¹⁷.

Dalam hal kepribadian, beliau terkenal dengan kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Hal ini tercermin dalam beberapa nasehat dan tata hikmah beliau yang mulia yang antara lain :

1. Jika ku dapati air minum sejuk mengurangi muruah tentu aku tidak meminumnya.
2. Manusia yang paling tinggi derajatnya adalah manusia yang tidak melihat derajatnya, beliau juga mulia-mulia manusia adalah yang tidak melihat kemuliaannya.
3. Engkau di jadikan Allah bebas, maka hendaklah engkau hidup bebas sebagaimana engkau dijadikan¹⁸.
4. Barang siapa yang rela terhadap apa yang telah tentu lenyaplah dari padanyasifat nista.
5. Bagus-bagus simpanan yang akan berguna bagi seseorang itu adalah memelihara diri dari kejahatan, dan kejahatan-kejahatan itu adalah permusuhan.
6. Sekali-sekali saya belum pernah bersumpah dengan nama Allah baik dengan sumpah yang benar jangankan dengan sumpah yang tidak benar.

¹⁷ Abdurrahman as-Syarqawi, *op.cit.*, h. 122-128

¹⁸ Ahmad As-Syurbasi, *op. cit.*, h. 162

Beliau adalah orang yang sangat sederhana, baik dalam hal makanan maupun pakaian. Beliau biasa memakai kain tenun, kopiah yang tidak terlalu tinggi dan sorban dari kulit yang tipis. Beliau tidak akan makan bila tidak lapar dan bila makan tidak sampai kenyang. Kebiasaan beliau adalah memberikan sebagian hartanya yang beliau peroleh kepada fakir miskin. Ketika ia mendapat hadiah dari Harun ar-Rasyid uang sebanyak 5000 dinar ia membagikannya kepada fakir miskin dan ia hanya mengambil 100 dinar saja untuk keperluannya¹⁹.

Imam Syafi'i menetap di Mesir selama hampir 6 tahun, yakni sejak akhir bulan Syawal 98 H sampai akhir Rajab 240 H²⁰. Akhir hayat beliau diawali dengan sakit wasir yang beliau derita dan susah diobati. Hal ini dikarenakan beliau kebanyakan duduk dan menulis dan kondisi tubuhnya semakin melemah dan penyakitnya semakin parah. Puncaknya pada saat beliau dianiaya oleh penyakit fityan (pelaku kerusakan dan kerusakan yang selalu menyebarkan perselisihan berdasarkan persoalan khilafiyah). Mereka memukul Imam Syafi'i hingga pingsan dan dalam keadaan tidak sadar ia dibawa ke rumahnya. Namun ia menolak untuk diobati ia hanya mengutus seorang kerumah Nafisah untuk meminta doa sebagaimana kebiasaannya jika ia sakit. Nafisah berkata kepada utusannya itu : “ semoga Allah menerimanya dengan baik dan memberi kenikmatan bila melihatnya”. Imam Syafi'i lalu sadar bahwa saat itu merupakan bertanda kedekatan akhir hayat beliau²¹. Beberapa wasiat yang ia kemukakan ketika menderita akhir hayatnya antara lain kepada ar-Rabi' salah seorang muridnya bahwa apabila beliau wafat maka hendaklah ia memberi tahu wali Mesir dan

¹⁹ Ahmad Surbasi. *op.cit.*, h. 160

²⁰ Moenawir Cholis, *op. cit.*, h. 224

²¹ Abdurrahman As-Syarqawi. *op. cit.*, h. 135

memintanya untuk memandikannya. Tepat pada hari kamis malam jum'at tanggal 29 Rajab 204 H²². 20 Januari 820 beliau wafat dengan tenang sehabis shalat isya' dalam usia 54 tahun. Berita kewafatan Imam Syafi'i dalam sekejap tersebar di seluruh kota Mesir dan orang-orang pun datang untuk turut berduka cita . tatkala wasiat beliau di sampaikan kepada wali negeri Mesir seketika itu pula ia bergegas kerumah beliau untuk memandikan jenazahnya. Jenazah beliau di keluarkan dari rumah beliau pada tanggal 30 Rajab sehabis shalat ashar dengan diantar ribuan umat dari segenap lapisan masyarakat Mesir untuk memakamkan di pemakaman Banu Zaharah yang terkenal sebagai pemakaman keturunan Abdul hakam yang sekarang terletak dibawah kaki gunung al-Muqathon di Mesir²³.

C. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Syafi'i

1. Guru-guru Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i adalah merupakan seorang pecinta ilmu, oleh sebab itu ia tidak segan-segan dan jemu menuntut ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang di pandangnya memiliki keahlian tentang ilmu. Diantara guru-guru yang terkenal adalah :

a. Di Mekkah

Muslim bin Khalid az-Zanji

Ismail bin Qusthantein Ismail

Sofyan bin Ujainah

Sa'ad bin Abi Salim al-Qaddah

²² *Ibid*

²³ Moenawir Chalil. *op. cit.*,h 225-226

Daud bin Abdurrahman al-‘Athar

Abdul Hamid bin Abdul Azis

b. Di Madinah

Imam Malik bin Anas (pembangun mazhab Maliki)

Ibrahim ibnu Sa’ad

Abdullah bin Nafi

c. Di Yaman

Mathraf bin Mazin

Hisyam bin Yusuf Qadli Shan’a

Umar bin Abi Salamah (pembangun mazhab Auza’i)

Yahya bin Hasan (pembangun mazhab Leits)

2. Murid-murid Imam Syafi’i

Selain mempunyai guru Imam Syafi’i juga mempunyai murid-murid yang banyak, sehingga terbesar diantara kota besar diantaranya adalah :

a. Di Mekkah

Abu Bakar Al-Hamidi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad, Abu Bakar Muhammad bin Idris merupakan murid Imam Syafi’i yang menguasai bidang Fiqih dan juga Hadits. Sedangkan Abdul Walid Musaibnu al-Jarud merupakan murid Imam Syafi’i yang banyak mengumpulkan fatwa-fatwa, dan termasuk seorang murid yang gigih dalam mengembangkan fatwa gurunya.²⁴

b. Di Bagdad

²⁴ Sirajuddin Abbas. *op. cit.*,h. 118

Abu al-Hasan as-Shabah az-Za'faran (w. 260 H) Abdullah bin Zuber al-Humaidi, (W. 219 H). Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman al-Kilb adalah seorang yang gigih dalam mengembangkan mazhab Syafi'i, juga merupakan seorang ulama fiqh yang terkenal. Ahmad bin Hambal (W. 240 H) merupakan murid yang sangat erat hubungannya dengan Imam Syafi'i dan penganut setia mazhab Syafi'i, yang mana kemudian membentuk mazhab Hanbali. Ahmad bin Yahya bin Abdul Azis al-Baqhdadi, seorang ahli kalam dan penghafal hadis, selain dari pada itu, Hasan bin Muhammad bin Shahah, Abu Ali al-Husain bin Abi Karabisi juga merupakan murid Imam Syafi'i.

c. Di Mesir

Yusuf bin Yahya al-Buwaithi al-Mishri pernah belajar hadis dan fiqh dengan Imam Syafi' dan is diberi kepercayaan untuk duduk dalam majlis fatwa, dan ditunjuk sebagai guru untuk menggantikan Imam Syafi'i. sedangkan Harmalah bin Yahya bin Abdul al-Tajbi berusaha untuk mengembangkan mazhab Syafi'i dengan cara meriwayatkan kitab-kitabnya. Di samping itu Abu Bakar Muhammad bin Ahmad, Rabi' bin Abdul Jabar al-Muradi, Yunus bin Abdul Ala' juga murid Imam Syafi'i.

D. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i semasa hidupnya banyak mengarang buku dalam berbagai bidang dan juga bermutu tinggi, diantaranya di bidang *hadits*, *ushul*, *fiqh* dan *sastra*. Menurut sebagian ahli sejarah kitab yang disusun beliau dalam bidang-bidang tersebut ada 13 buah. Sedangkan menurut Yakut dalam kitabnya *Mu'jam al-Udaba* sebagaimana di kutib Dr. Ahmad Syurbasi, kitab-kitab yang dikarang Imam Syafi'i itu puluhan jumlahnya. Namun kitab-kitab yang di

karang beliau tidaklah sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, tetapi hanya beberapa dalam ilmu fiqh dan kebanyakan bab ini telah dimasukkan ke dalam kitab *al-Umm*.²⁵

Diantara kitab-kitab Imam Syafi'i adalah "*ar-Risalah*" yang mana membicarakan tentang ilmu Usul Fiqh. Beliau menyusun kitab *ar-Risalah* sebagai penerimaan atas permintaan Abdur Rahman ar-Mahdi, beliau adalah sebagai imam dalam ahli hadis pada masa itu. Manusia pada umumnya telah menyambut dengan baik kitab *ar-Risalah*.²⁶

Kemudian kitab "*al-Umm*" *al-umm* adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqh. Sebagian pengkaji sejarah menafikan kitab *al-umm* dikarang oleh Imam Syafi'i. Mereka berpendapat kitab *al-umm* adalah dikarang oleh Abi Yakub al-Buaiti.²⁷ al-Buaiti mengikhtisarkan kitab-kitab Imam Syafi'i dan menamakannya dengan *al-Mukhtasar*, demikian juga *al-Muzani*.²⁸

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

1. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah*.

Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*.

Selanjutnya, kitab *al-Risalah* adalah kitab yang pertama kali dikarang Imam Syafi'i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. al-Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd. Rahman ibn al-Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, nasih dan mansukh serta hadits Nabi. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh

²⁵ Ahmad Syurbasi. *op. cit.*, h. 160

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ali Hasan *op. cit.*, h. 207

murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya maka dinamai al-Risalah, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd al-Rahman ibn Mahdi di Makkah.²⁹

2. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzany dan *Mukhtashar* oleh al-Buwaithy.

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

1. Kitab *al-Risalah*, tentang ushul fiqh
2. Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
 - a. Kitab *Ikhtilaf* Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila.
 - b. Kitab *Khilaf* Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
 - c. Kitab *Ikhtilaf* Malik wa al-Syafi'i.
 - d. Kitab *jami' al-'Ilmi*.
 - e. Kitab *al-Radd 'Ala* Muhammad ibn al-Hasan.
 - f. Kitab *Siyar al-Auza'yi*.
 - g. Kitab *Ikhtilaf al-hadits*.
 - h. Kitab *Ibthalu al-Istihsan*.
3. Kitab *al-Musnad*, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
4. *al Imla'*.
5. *al-Amaliy*.

²⁹ *Ibid*, h. 134

6. Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
7. *Mukhtashar al-Muzaniy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
8. *Mukhtashar al-Buwaitthy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
9. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir, dan lain-lain.

Kitab *al-Risalah* merupakan kitab yang memuat ushul fiqh. Dari kitab *al-Umm* dapat diketahui, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh.³⁰

³⁰ *Ibid*, h. 135-136

A. Pengertian Zakat

¹ Abu Bakar ibnu Muhammad al-Khusaini. Ter. *Kifarat al-Ahyar*. (Semarang: Maktabah wa Muthabaah, Toha Putra). cet. ke 2 h 172

Menurut Abdurrahman al-Jaziri

الطهيرة والنماء

Artinya : “ Suci tumbuh (berkembang)”.³

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan diatas mengenai pengertian bahwa zakat itu adalah suatu yang berkah, tumbuh, berkembang, suci, serta baik.

2. Pengertian Zakat menurut Istilah

Menurut Abdurrahman al-Jazari

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرا نط

Artinya “ Perpindahan milik harta tertentu bagi orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.”

Rumusan yang di kemukakan al-jazari ini menjelaskan zakat itu adalah harta yang dimiliki seseorang yang telah sampai nisabnya, maka di fardukan bagi mereka memberikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq

Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT.yang dikeluarkan seseorang dari fakir miskin.⁴

Dari defenisi iang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah tersebut menitik beratkan pada sesuatu atau meteri yang diberikan manusia dari hak Allah kepada fakir miskin. Namun dalam defenisi ini orang yang berhak menerima zakat ahanya

² Departemen Agama RI. *op.cit.*, h. 297

³ Abdurrahman al-Jaziri. Terj. *al-Fiqh Ala Mazhab al- Arba'ah*. (Mesir al-Maktabah al-Kubra).juz 1 h.

⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* 3, (Bandung : PT.al-Ma'arif, 1978) cet.1 h. 5



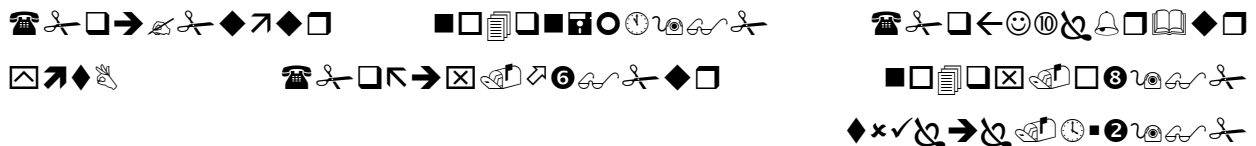
Artinya “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.(Q.S az-Zariyat : 19)⁶

B. Hukum dan Syarat Zakat

1. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang lima,dan merupakan fardu a’in atas tiap tiap orang yang cukup syaratnya. Zakat itu wajib berdasarkan firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW.

- Surat al-Baqarah ayat 43



Artinya “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S al-baqarah : 43)⁷

- Surat an-Nisa’ ayat 77



Artinya “ Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!” (Q.S an-Nisa’ :77)⁸

Sunnah Nabi SAW:

- Hadis Nabi yang di riwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas Nabi bersabda kepada Mua’az bin Jabal waktu di utus ke Yaman:

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

عن ابن عباس رضي الله عنه ان معا رضي الله عنه قال ... فاعلمهم ان الله افترض عليهم
من اغنياهم فترد على فقرائهم...

Artinya “ Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Muaz r.a berkata Rasul mengutusku seraya berkata “...jika mereka mematuhi itu, maka Beritahulah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan atas mereka zakat yang di ambil dari orang-orang kaya , kemudian dikembalikan kepada mereka yang fakir...sampai ahir (H.R Muslim).⁹

2. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Adapun Mengenai syarat-syarat wajib zakat adalah

a. Islam

Menurut Ijma' zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum riddahnya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika ia masih menjadi seorang muslim.

b. Berakal

Orang yang tidak Islam, tidaklah dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta kekayaan mereka, karena zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada umat Islam. Dan sesungguhnya zakat itu harus ada niat, sedangkan niat saja tetapi ia dalam keadaan kafir , maka zakatnya tidak sah. dengan arti lain bahwa zakat yang dituntut untuk melaksanakannya adalah orang Islam.

c. Harta milik sempurna(penuh)

⁹ M. Nashiruudin al-Albani . *Ringkasan Shahih Muslim*,.(Jakarta: Gema Insani, 2005). cet. ke 1 h. 243

Harta tersebut adalah milik yang sempurna, dengan syarat ini jelaslah hanya harta yang dimiliki secara penuh saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun yang dimaksud dengan “penuh” adalah ini terdiri dari dua kata yaitu pemilik dengan penuh. Pemilik menurut terminologi adalah “mengusai dan dapat mempergunakannya. Di dalam *al-Mu’jam al- Wasith* disebutkan bahwa memiliki sesuatu berartimengusai dan hanya ia yang dapat menggunakannya.

Yang dimaksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu haruslah dibawah kontrol dan di dalam kekuasannya.¹⁰

d. Mempunyai harta sampai senisab

Menurut jumhur ulama, harta yang dimiliki tersebut harus mencapai nisab. Maksudnya istilah nisab yang ditemukan oleh syara’ sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar berikut yang berkewajiban zakat. Contoh nisab zakat emas adalah 94 gram, nisab hewan ternak kambing adalah 40 ekor, sedangkan Abu Hanifa berpendapat nisab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepenuhnya tetap diwajibkan baik dalam tanaman yang banyak maupun sedikit.¹¹

e. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak miliktuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya demikian pula mukatif (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal

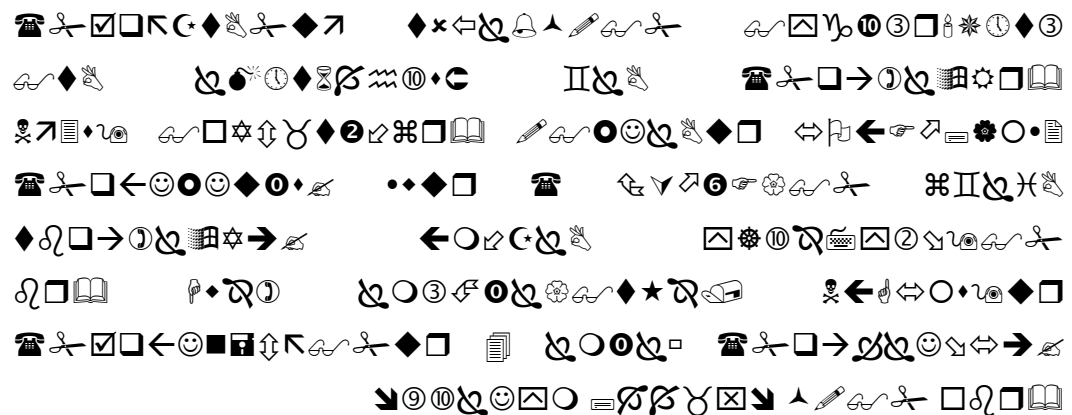
¹⁰ Yusuf Qardawi. Terj. *Fiqhuz Zakat*, (Bogor Baru : Litera antar nusa 1992), cet. ke 10 h. 127-128

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili. Terj. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung : PT. Remaja Ros Dakarya, 1997), cet . ke 3 h. 102-108

dengannya tidak tidak wajib mengeluarkan zakat karena hartanya tidak dimiliki secara penuh. Mazhab maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban akat pada harta milik seseorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta hamba sahaya tidak sempurna padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

f. Diperoleh Dengan Cara Yang Baik dan Halal

Artinya harta yang haram, baik substansibenda maupun cara medapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267



Artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S al-Baqarah : 267)¹²

g. Berkembang

Disyaratkan harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kesiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, baik

¹² Depag. *op.cit.*, h. 35

dilakukan sendiri maupun dilakukan dengan pihak lain. Harta yang tidak berkembang ataupun tidak berpotensi maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya dizaman Rasulullah Saw termasuk harta yang tidak produktif maka tidak menjadi objek zakat.¹³ Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhori dan Abi Huraira, Rasulullah Saw bersabda :

بى هريرة، روى الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة

Artinya : “ Dari Abu Huraira bahwa Rasullullah SAW bersabda, “tidak wajib zakat atas Seorang muslim pada budak dan kuda.¹⁴

h. Lebih Dari Kebutuhan

Sebagian u,ama Mazhab Hanafi¹⁵ mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok. Ibn Malikmenafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal dan lain-lain. Alasan mereka adalah firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 219.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا قُلْنَا هَاجِرُوا إِلَيْنَا فَأْجُرُوا عَنْكُمُ الرِّبَا الَّذِي أَكَلْتُمْ مِمَّا قَبْلُ فَرِحُوا بِرَبِّهِمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهَاجِرُونَ الصَّالِحُونَ

Artinya :“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: " yang lebih dari keperluan"(Q.S al-Baqarah ayat 219).¹⁶

C. Harta Yang Wajib Di Zakati

¹³ Yusuf Qardawi. *op. cit.*, h. 138-139

¹⁴ M. Nashiruudinal-Albani *op.cit.*, h. 297

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily. *op.cit.*, h. 114

¹⁶ Departemen agama.*op.cit.*, h. 25

Harta yang wajib dizakatkan menurut ketentuan islam ada beberapa macam:

Emas dan perak, tanam-tanaman, hasil tambang, binatang tenak, barang dagangan dan harta terpendam.¹⁷

Selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih jelas masing-masing dari jenis harta yang dizakatkan seta persentase pengeluarannya.

1. Emas dan Perak

Dalil yang menerangkan tentang wajib zakat emas dan perak adalah Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 34



Artinya “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (Q.S at-Taubah : 34)¹⁸

Adapun nisab emas adalah 20 mistqal = 41/2 gram jadi nisabnya 90 gram.

Adapun seperti yang diambil dari buku Shahih Muslim karangan Adil Bisri Musthafa mengatakan nisabnya adalah 200 mistqal, bila perak itu belum mencapai 200 ,istqal maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana hadis Nabi:

¹⁷ Sayyid Sabiq *op.cit.*, h. 286

¹⁸ Departemen Agama RI. *op.cit.*, h. 157

الله صلى الله عليه وسلم... وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن الا ومائة فليس فيها شيء الا

ان يا ربها

Artinya “Dari Nabi SAW bersabda...zakat perak kalau $\frac{1}{4}$ puluh dari nilai harga perak itu, tetapi kalau harganya Cuma 190,tidak wajib zakatnya, kecuali kalau yang punya mau mengeluarkannya ”. (H.R Bukhari)¹⁹

2. Barang dagangan

Adapun yang menyatakan tentang wajibnya zakat pada barang dagangan adalah Firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 267



Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah dari hasil usahamu yang baik”. (Q.S al-Baqarah : 267)²⁰

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan segala hasil usaha wajib dizakatkan. Adapun harta perniagaan atau perdagangan itu merupakan salah satu bentuk hasil usaha, oleh karena itu wajib dizakatkan.

Adapun nisab zakat perniagaan, adalah sama dengan nisab emas dan perak yaitu 1/40 atau 2,5%

Sedangkan masa pembayaran harta perniagaan zakat harta perniagaan ini juga sama dengan perniagaan zakat emas dan perak yaitu apabila sampai satu tahun perniagaan dihitung dari mulai perniagaan.

¹⁹ al-Imam Bukhari. *Terjemahan Shohih Bukhari*, (Kuala Lumpur : Kilang book, 2005) cet. ke 6 h. 122

²⁰ Departemen Agama. *op.cit.*, h. 35

3. Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud dengan benda-benda terpendam adalah berbagai macam harta benda yang terpendam oleh orang-orang dulu didalam tanah, seperti emas, perak, tembaga pundi-pundi berharga dan lain-lain, para ahli fiqih sepakat bahwa orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%) berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadis yang berasal dari Abu Huraira yang mengatakan bahwa “ sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa benda-benda yang disimpan didalam tanah adalah rikaz, karena benda tersebut terpendam didalam tanah.”²¹

Diantara pertikaian ulama fiqih ialah dalam hal menentukan jenis barang tambang yang harus dikeluarkannya zakatnya. Pedapat Imam Syafi'i yang populer yaitu membatasinya hanya emas dan perak saja. Sedangkan yang lain tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti emas, besi, tembaga, timah, kristal, batu bata dan berbagai macam batu permata seperti yaqut, akik, zamrud dan lain-lain.²²

4. Binatang Ternak

Para ulama telah sepakat menetapkan wajib zakat pada binatang ternak ini dijelaskan pada hadis Nabi sebagai berikut :

, بعشي رسول الله صلى الله عليه وسلم لى اليمن
بعين. ثنية, ل ثلاثين, تبيعاً, دينارا وعدله معا فر

Artinya : “ Dari mu'az ia berkata, Rasulullah SAW, mengutus kuke negri Yaman, lalu beliau memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 40 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun lebih, dari setiap 30 ekor

²¹ Yusuf Qardhawi *op.cit.*, h. 410

²² *Ibid*

sapi zakatnya satu ekor sapi jantan yang berumur satu tahun lebih, serta dari setiap orang yang telah baligh diambil satu dinar atau sebanding dengan nilai itu pada kaum mu;afiri (H.R Bukhari).²³

Pernyataan tentang unta, tidak wajib zakat pada unta, jika kurang dari 5 ekor, maka apabila sampai 5 ekor digembalakan dan cukup masa satu tahun maka zakatnya berupa seekor kambing betina.²⁴

Apabila syarat pengembala kambing sudah ditetapkan maka wajib pulalah syarat itu pada unta dan sapi dengan cara mengkiaskan pada kambing tersebut, karena terdapat persamaan.

Maka tidak boleh lambat mengeluarkan harta zakat tersebut. Pembayaran harus pada waktu yang ditentukan, karena menurut pendapat Malik, Syafi'i dan Ahmad serta Jumhur Ulama, zakat itu tidak boleh dilambatkan dari masa wajibnya. Maka barang siapa yang melambatkan dari masanya adalah dosa.²⁵

Sayyid Sabid juga mengatakan dalam bukunya Fiqih Sunnah adapun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tetapi masih mengaku wajibnya akan memikul dosa disebabkan keengganannya dan hakim hendaklah mengambil zakat itu secara paksa.²⁶

5. Biji makanan dan Buah-Buahan

Ibnu Umar dan sebagian Tabi'in serta sebagian ulama berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) dan sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

²³ al Imam al Bukhari . *op.cit.*, h. 129

²⁴ Hasby Ash-Shiddiqi. *op.cit.*, 75









































²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Wajib zakat pada tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian adalah sebagai mana hadis nabi SAW:

Artinya “ Dari Abdullah ra. Dari Nabi SAW bersabda : tanaman yang di airi dengan air hujan atau dengan mata air, atau tanaman yang tumbuh dirawa-rawa zakatnya seper sepuluh dan yang di airi dengan tenaga angkutan, zakatnya sepersusa puluh ”. (H.R Bukhari)²⁸

Dalil yang menjelaskan batasan orang-orang yang menerima zakat, pada ayat 60 surat at-taubah dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah:

²⁸ al-Imam Bukhari. *op. cit.*, h. 134



Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” ”.(Q.S At-Taubah:60)²⁹

Penjelasan dari yang berhak menerima zakat delapan asnaf yaitu dari ayat diatas yaitu :

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu dan keturunan yang dapat membiayai hidupnya.³⁰
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi hasilnya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.³¹
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Disyaratkan panitia ini harus memiliki sifat kejujuran, dan menguasai hukum zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

²⁹ al-Qur'an dan Terjemahan. *op.cit.*, h. 156

³⁰ Wahbah al-Zuhaili. *op.cit.*, h. 280

³¹ *Ibid.*

- ## E. Hikmah dan Manfaat Zakat

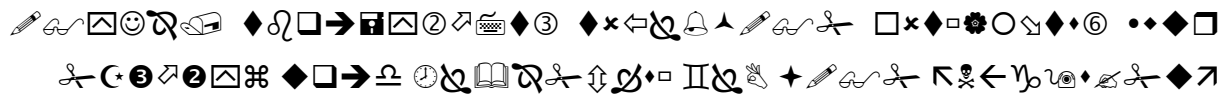
Diantara kegunaan dan manfaat zakat itu adalah:

- ☾◻♦🔔🖼️⑨⚙️🕒 🏠👤●📞=🕒◆◻🗂️📄📖 ↕️Ⅱ📄📄 🔍0➡️🌸
- 🌀◻&ℱ 👤📈③📄👉📁♦8➡️📄◆◻ 🏠➡️📐🕒📄📐•🔄➡️📄
- ☒Ⅱ♦📊🖼️🔍 🖼️🖼️♦📄📄◻📈⚙️🕒 ◻🕒📄📄📞 🏠📄📄📄📄📄♦📄 📄📄📄⚙️🕒◆◻
- 📁📁⑩📄📄♦📄 📈📈0📄📄📄 ☺🖼️🔍+✎🌀✂️◆◻ 📊🏠📄📄●📄=

3. Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat yang diberikanNya

³² Departemen Agama *op.cit.*, h. 297

4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan orang terlantar, sebagaimana kita lihat sendiri betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang mulanya baik-baik tetapi menjadi jahat dan merusak masyarakat, bangsa dan negara. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 180



Artinya “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka”(Q.S Ali Imran :180).³³

5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya. Erat hubungan tersebut akan membawa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi keua golongan dan masyarakat.

Dari beberapa poin yang telah di kemukakan diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa zakat adalah sebagai ibadah mulai untuk mensyukuri nikmat harta yang telah di karunia Allah kepada manusia.

Sangatlah rendah budi seseorang yang memandang fakir miskin ayng hidup dalam kesempitan dan kesusahan dan hatinya tidak tergerak untuk membantu fakir miskin tersebut dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT.

Zakat itu adalah difarduka tidak hanya sebagai kasih sayang kepada orang fakir miskin, tetapi jga untuk menghindarkan bahwa kelaparan da kemiskinan yang mungkin akan terjadi dikalangan masyarakat.

³³ *Ibid.*

Apabila hartawan telah mengeluarkan kewajiban zakat tertentu mereka akan disanjung dan dihormati serta berwibawa dikalangan fakir miskin. Tetapi sebaliknya, manakala hartawan tidak menunaikan kewajibannya, serta harta mereka bertumpuk-tumpuk akibatnya akan menimbulkan kekacauan, perampokan yang mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DITINJAU MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I

A. Profil UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

1. Latar belakang Lahirnya UU No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Secara singkat, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat secara kualitatif dimulai sekitar tahun 1968, di mana pada tahun itu pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pembentukan BAZIS (No. 4 / juli 1968) dan baitul mal (No. 5 Oktober 1968). Ini menghasilkan konsep BAZ, infak, shadaqah (BAZIS), suatu organisasi yang menghimpun dana harta agama yang beranggotakan campur tangan antara unsure-unsur pemerintah dan tokoh-tokoh agama masyarakat.

Landasan usaha-usaha untuk melestarikan dan mengembangkan zakat lebih luas di Indonesia, selain bersifat dorongan dari agama islam itu sendiri juga dilandasi oleh kesadaran untuk mengamalkan landasan-landasan konstitusional bangsa Indonesia. Yaitu kaidah-kaidah sebagaimana di tetapkan dalam pancasila, UU 1945, GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

Adanya dorongan dari masyarakat Islam untuk mewujudkan zakat secara merata dan sungguh-sungguh di Indonesia yang didasari oleh keinginan untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya serta kesadaran umat Islam yang semakin tinggi untuk bersama-sama pemerintah ikut serta memecahkan masalah sosial kemasyarakatan. Keinginan-keinginan ini tumbuh wajar sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang makin meningkat untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan social masyarakat.¹

¹ Mursyid. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang* (Yogyakarta : Magistra Insani Press, 2006), cet. ke 1 h. 15

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, upaya penyempurnaan pengelolaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan.²

Menanggapi keinginan masyarakat yang begitu kompleks tentang zakat ini, pemerintah pada tanggal 23 September 1999 menerbitkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie. Undang-Undang menjadikan pungutan zakat terhadap masyarakat sudah di legitimasi oleh hukum bukan hanya sebagai kewajiban agama saja, akan tetapi secara hukum positif keberadaan pengelolaan zakat tersebut telah diatur dalam lembaran Negara.

2. Tujuan

Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, asas dan tujuan zakat terdapat pada bab II pasal 4 “Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. dan 5.

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;

² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), cet.ke 1 h. 103

2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

3. Materi Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

UU ini terdiri dari 10 Bab dan 25 pasal. dalam skripsi ini tidak semua pasal dan bab yang akan dibahas, tetapi hanya bagian-bagian pasal-pasal tertentu yaitu bab III, bab IV pasal 12, 14, bab V pasal 16, 17 bab VII pasal 21.

Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah mengatur mengenai Organisasi Pengelolaan Zakat pada bab III, pengumpulan zakat pada Bab IV, pendayagunaan zakat pada bab V. Ketiga bab tersebut merupakan proses pengelolaan zakat menurut pemerintah Republik Indonesia. Demi mengoptimalkan dan memberdayakan zakat untuk kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dana pendistribusian serta pendayagunaan zakat³.

Ada beberapa alasan mengapa Negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat:

1. Zakat bukan merupakan kedermawanan, sebagaimana infak, sedekah, dan hibah. Zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah, hibah dan infak hukumnya sunnah. pengumpulan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat at-taubah ayat 103.

³ UU no. 38 tahun 1999 . *op.cit.*, . Pasal 1 h. 7

Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam system demokrasi seperti halnya pemungutan pajak. Apabila hal itu disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan Negara.

2. Zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian pembangunan nasional.

Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Dalam priode tertentu suatu negara membuat rencana pembangunan di berbagai bidang sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cuup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

3. Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efesien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik yang tersalurkan sendiri maupun melalui berbagai lembaga yang telah banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat dipetik, namun hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya itu dilakukan oleh Negara melalui perangkat perangkatnya.

4. Memberikan control kepada pengelola Negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia dan Negara-negara muslim adalah korupsi atau penyalahgunaan. keuangan Negara. padahal, sebagian bear pengelola Negara ini mengaku beragama islam. Penyalahgunaan ini antara lain disebabkan oleh lemahnya iman untuk menghadapi korupsi. masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan Negara

duharakan akan menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepenuhnya dikorupsi juga.⁴

Pada bab IV skripsi ini akan mengemukakan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat menurut Imam Syafi'i kemudian dianalisis.

B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

1. Aspek Asas dan Tujuan Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, asas dan tujuan zakat terdapat dalam bab II pasal 4 dan 5. Pada pasal 4 dikatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, dan dalam pasal 5 dikatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁵

2. Aspek Pengelolaan Zakat

⁴ [http://www. Geoogle.co.id/seartch/client=fifefox-a&rls=org.mozela%3AenUS%3Aalasan pemerintah ikut campur tangan dalam pengwlolaan zakat =&btnG=enelusura+geoogle](http://www.Geoogle.co.id/seartch/client=fifefox-a&rls=org.mozela%3AenUS%3Aalasan+pemerintah+ikut+campur+tangan+dalam+pengwlolaan+zakat+%3D&btnG=enelusura+geoogle). Unduh 05 november 2010 jam 19.22 WIB

⁵ Undang Undang *op. cit.*, pasal 5

Dalam pasal(6 ayat 1,2,3)Bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Pembentukan BAZ meliputi wilayah Nasional, daerah propinsi, daerah kabupaten, atau kota dan kecamatan, hubungan kerja pada tiap tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.⁶ Yang diaksud dengan BAZ adalah organisasi pengeola zakat yang dibentukoleh pemerintah terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 1 ayat 1).⁷

3. Aspek Pengumpulan Zakat

Dalam pasal (11ayat 1) Asas pengumpulan zakat dalam BAZ terdiri atas zakat Mal dan zakat Fitrah. Pasal (12 ayat 1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *Muzakki* (orang yang berzakat) atas dasar pemberitahuan *muzakki* (orang yang berzakat). (Pasal 12 ayat 2) Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat harta *Muzakki* (Orang yang berzakat) yang berada di bank atas dasar permintaan *Muzakki* (orang yang berzakat).⁸ (Pasal 13) badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti, Infaq, Shadaqah, wasiat , waris dan kafarat.⁹

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan siluar zakat untuk memaslahatan umum. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untukkemaslahatan umum. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada BAZ atau LAZ. Wasiat adalah pesan untuk memberikan

⁶ *Ibid.* pasal 6

⁷ Undang-Undang Zakat, *op.cit.*, pasal 1 ayat 1

⁸ *Ibid.* pasal 12

⁹ *Ibid.* pasal 13

suatu barang kepada BAZ atau LAZ, pesan itu dilaksanakan sesudah yang berwasiat meninggal dunia dan setelah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama isla, yang diserahkan kepada BAZ atau LAZ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

(Pasal 14 ayat 3) zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajibpajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

4. Aspek Pendayagunaan Zakat

(Pasal 16 ayat 1) Pendayagunaan Zakat digunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. (Pasal 16 ayat 2) pendayagunaan zakat berdasarkan atas prioritas kebutuhan orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dan dapat digunakan untuk kebutuhan produktif.¹²

Mustahiq delapan asnaf adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah dan ibnussabil yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, pegungsian yang terlantar, korban bencana alam.¹³

5. Aspek Pengawasan

¹⁰ Undang-Undang. *op.cit.* penjelasan pasal 13

¹¹ Undang-Undang. *op.cit.*, pasal 14 ayat 3

¹² *Ibid.* pasal 16

¹³ Undang-Undang. *op.cit.* penjelasan pasal 16 ayat 2.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawasan (pasal 18 ayat 1) pengawas yang dipilih langsung oleh anggota (pasal 18 ayat 2). Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat (pasal 18 ayat 3). Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat (pasal 20)

6. Aspek Sanksi

Sanksi diberikan apabila setiap anggota mengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, wasiat, waris, hibah, (pasal 21 ayat 1)

C. Pengelolaan Zakat Menurut Imam Syafi'i

1. Aspek pengelolaan

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, satu sisi dalam rangka yang bersifat ketuhanan dan yang kedua dalam rangka bermuamalah ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Zakat pada dimensi muamalah dapat secara langsung ditunaikan tanpa melalui perantara dalam hal ini *muzakki* (orang yang berzakat) dapat menyerahkan langsung zakatnya kepada *mustahiq* (orang yang menerima zakat). Zakat dapat pula diserahkan kepada *Amil* (petugas) yang telah ditunjuk yang kemudian petugas zakat yang bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada *mustahiq* (orang yang menerima zakat). Menurut Imam Syafi'i pembagian zakat padanya seorang *muzakki* (orang yang

berzakat) dibolehkan untuk membagikannya sendiri. Akan tetapi ini terbagi menjadi dua macam harta yang pertama harta batin yang kedua harta zahir. Adapun yang dibolehkan dan diantara ulama Syafi'i yaitu dibolehkan bagi pemilik harta untuk membagikan zakat hartanya secara langsung disekitar harta batin, antara lain : Emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah.¹⁴

Untuk mencapai keidealan terlaksananya zakat, orang-orang yang ditunjuk untuk mengurus masalah zakat harus memiliki syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Sedah dewasa
3. Sehat akal pikirannya
4. Jujur
5. Memahami hukum zakat
6. Mampu melaksanakan tugas dan lain sebagainya.¹⁵

2. Aspek Pengumpulan

Adapun mengenai pengambilan (pengumpulan) zakat secara paksa bagi orang yang telah wajib membayar zakat akan tetapi tidak mau mengeluarkannya, Imam Syafi'i dan semua ulama sepakat untuk melaksanakannya. Dengan dijatuhi hukuman kufur karena mereka ingkar terhadap kewajiban. Orang yang ingkar membayar zakat tersebut bisa dijatuhi hukuman penjara sebagai suatu upaya untuk mendidiknya agar menjalankan

¹⁴ Yusuf Qardhawi. Terj. *op. cit.*, h. 746

¹⁵ Yusuf Qardhawi. Terj. *op.cit.*, h. 551

perintah agama.¹⁶ Menurut Imam Syafi'i bahwa tidak pantas bagi petugas zakat untuk menunda penarikan sampai lewat masa satu tahun.¹⁷

Adapun landasan yang digunakan Imam Syafi'i adalah sebagai berikut: Zakat diwajibkan berdasarkan al-qur'an, sunah dan ijmak. Dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an banyak menggunakan bentuk *amar* (perintah) yang terdapat dalam surat At-taubah ayat 103



Artinya: “Ambillah zakat dari mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.¹⁸

Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa seorang amil (petugas zakat) mendapat bagian zakat dengan bagian yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak boleh lebih dari itu. Apabila ia seorang yang berkecukupan, maka ia diberi harta zakat sebagai upah jerih payahnya.¹⁹

Adapun mengenai pengambilan (pengumpulan) zakat secara paksa bagi orang yang telah wajib membayar zakat tetapi tidak mau mengeluarkannya, Imam Syafi'i dan ulama lainnya sepakat untuk melaksanakannya dengan dijatuhi hukuman kufur, karena mereka ingkar terhadap kewajiban. Orang yang ingkar membayar zakat tersebut bisa dijatuhi hukuman penjara sebagai suatu upaya untuk mendidik agar menjalankan perintah agama.²⁰

¹⁶ Yusuf Qardhawi. Terj. *loc.cit.*,

¹⁷ Imam Syafi'i. terj. *op.cit.*, h. 512

¹⁸ Al-Qur'an dan terjemahan. *op.cit.*, h. 102

¹⁹ Imam Syafi'i. terj. *op.cit.*, h. 521

²⁰ *Ibid.* h. 766

Apabila petugas zakat belum datang juga kepada orang yang memiliki harta untuk ditarik zakatnya, padahal harta tersebut sudah mencapai haul, maka si pemilik harta boleh mengeluarkan dan membagikan zakatnya kepada orang yang berhak. Jika setelah pemilik harta membagikan dan petugas datang, maka petugas tidak boleh mengambil zakat yang kedua dari orang tersebut.²¹

Menurut Imam Syafi'i bahwa tidak pantas bagi petugas zakat untuk menunda penarikan zakat sampai lewat masa satu tahun.²²

Imam Syafi'i membenarkan pemungutan dana selain zakat kepada masyarakat yang mampu. Akan tetapi antara zakat dan pajak tidak boleh disamakan.²³

Menurut Imam Syafi'i bahwa keduanya wajib dilaksanakan artinya mereka yang telah wajib zakat juga berkewajiban untuk membayar pajak, begitu juga sebaliknya. Kewajiban yang satu tidak menghalangi kewajiban yang lain.²⁴ Alasannya adalah keduanya merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan. Kewajiban zakat berlandaskan Nash/agama sedangkan pajak berlandaskan ijtihad *ulil Amri* (pemerintah) dimana agama mewajibkan umatnya untuk taat kepada *ulil Amri* (pemerintah).²⁵

3. Aspek Pembagian / Pendayagunaan Zakat

Dalam hal pembagian zakat, menurut Imam Syafi'i pembagian zakat pada dasarnya seorang *muzakki* (orang yang berzakat) diperbolehkan membagikan zakatnya sendiri. Pendayagunaan zakat dapat dengan mudah dilakukan dengan mencatat siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan dihitung setiap jenis dari mereka menurut batasnya. Dengan demikian akan mendekatkan kepada keadilan. Imam Syafi'i berkata

²¹ *Ibid.* h. 511

²² *Ibid.* h. 512

²³ Ali Hasan. *op.cit.*, h. 29

²⁴ Hasan Basri. *op.cit.*, h. 143

²⁵ *Ibid.* h. 144

bahwa seorang petugas zakat hendaklah memulai perhitungan zakatnya dengan mencatat orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian mengelompokkan mereka berdasarkan kelompok masing-masing, kemudian setiap asnaf dihitung berdasarkan jumlah kelompok tersebut. Lalu mulailah mencatat nama-nama fakir dan miskin, dimulai dari orang yang fakir, setelah orang fakir dicatat semua barulah dimasukkan kedalam kelompok orang-orang miskin.²⁶

Setelah itu dilanjutkan dengan mencatat nama-nama *gharim* (orang yang terlilit hutang) kemudian dilanjutkan dengan nama-nama *Ibnu Sabil* (dalam perjalanan) kemudian nama-nama budak yang akan memerdekakan dirinya, kemudian nama-nama orang yang akan berangkat perang, kemudian nama-nama mua'laf dan nama-nama amil berikut bagian mereka masing-masing.²⁷

Imam Syafi'i berkata harta zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan asnaf (tingkatan masing-masing) bukan berdasarkan jumlah mereka. Hal itu bukan berarti mereka menerima bagian yang sama, akan tetapi tergantung kepada kebutuhan mereka masing-masing.²⁸

D. Analisis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ditinjau Menurut Pendapat Imam Syafi'i

Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah sebuah lembaga atau pun badan hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah dan bukan individu. Oleh karena itu penulis akan menganalisis pengelolaan zakat menurut Undang-Undang dan menurut Imam Syafi'i.

²⁶ Imam Syafi'i. *op.cit.*, h. 503

²⁷ *Ibid.* h. 504

²⁸ *Ibid.* h. 506

1. Aspek pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 *Amil* (Pengelola zakat) telah dilembagakan dengan sebutan Badan Amil Zakat (BAZ). Yang dibentuk oleh pemerintah. BAZ masing-masing mempunyai tingkatan yang dimulai dari tingkat nasional, daerah propinsi, kabupaten hingga kecamatan. Hal ini yang akan mewujudkan tujuan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Dalam hal pengelolaan zakat peran pemerintah dalam melaksanakan zakat bukan suatu hal yang baru dalam kehidupan umat Islam, sejak zaman sahabat sampai dinasti Bani Umayyah dan Abasiyah zakat telah diperhatikan oleh pemerintah dan pemerintah ikut serta dalam pengelolaan zakat, sebagaimana dalam pemerintahan Umar bin Khatab beliau mengutus beberapa orang untuk menjadi petugas zakat yang mengurus mengenai pengumpulan dan pendistribusian.

Pengelolaan zakat yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang no. 38 tahun 1999 di lihat dari pengelolaannya sebagaimana diatur dalam bab III bahwasannya zakat dilakukan oleh petugas zakat yang dibentuk oleh pemerintah sudah cukup baik ini menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap zakat.

Seorang muzakki dapat menyerahkan secara langsung zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat, zakat dapat pula diserahkan pada seorang *amil* (Petugas zakat) yang sudah ditunjuk yang kemudian petugas zakat menyerahkan kepada orang yang menerima zakat. apabila seorang *muzakki* (orang yang berzakat) telah membagikan zakatnya secara langsung maka bagian *amil* (petugas zakat) gugur. Menurut Syafi'i bahwa seorang *amil* (petugas zakat) mendapat bagian zakat dengan bagian yang bisa

mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak boleh lebih dari itu. Dan jika ia orang kaya harta zakat diberikan sebagai upah atas jerih payahnya.²⁹

Pengelolaan zakat yang telah terlembaga dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 secara hukum telah sah dan mempunyai kecakapan bertindak hukum karena BAZ telah memiliki badan hukum yang sempurna. BAZ dibentuk berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui beberapa proses sehingga menjadikan BAZ memang benar-benar lembaga yang berbadan hukum.

2. Aspek pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat merupakan tugas pokok *amil* (petugas zakat) sebagaimana dalam Undang-Undang pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam hal pengumpulan zakat Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa sebagaimana terdapat dalam pasal 12 ayat 1 “pengelola zakat akan mengambil zakat dari *muzakki* (orang yang berzakat) atas dasar pemberitahuan”. Seharusnya Undang-Undang ini mempunyai kekuatan untuk memaksa jika *muzakki* (orang yang berzakat) membayar zakat dan sudah sampai waktu pembayarannya, dan adanya hukuman bagi orang yang enggan membayarnya, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi’i adapun mengenai pengambilan (pengumpulan) zakat secara paksa bagi orang yang telah wajib membayar zakat akan tetapi tidak mau mengeluarkannya, Imam Syafi’i dan semua ulama sepakat untuk melaksanakannya. Dengan dijatuhi hukuman kufur karena mereka ingkar terhadap kewajiban. Orang yang ingkar membayar zakat tersebut bisa dijatuhi hukuman penjara sebagai suatu upaya untuk mendidiknya agar menjalankan

²⁹ Imam Syafi’i. *op.cit.*, h. 512

perintah agama. Imam syafi'i berkata bahwa tidak pantas bagi petugas zakat untuk menunda penarikan harta zakat sampai lewat masa satu tahun.

Pengumpulan zakat oleh BAZ dapat dengan mudah dilakukan dengan daftar nama-nama *muzakki* (orang yang berzakat) dan *mustahiq* (orang yang menerima zakat) pada wilayah yang dikuasainya.

Dalam pemungutan antara pajak dan zakat dapat disamakan dalam pembayarannya, tapi jika orang yang tidak membayar pajak ada hukum dan sanksinya. Tetapi jika orang tidak membayar zakat tidak ada hukum dan sanksi dari Negara. Jika dalam Undang-Undang antara zakat dan pajak dapat disamakan dalam pembayarannya maka zakat juga harus memiliki hukum bagi yang enggan membayarnya. Sanksi untuk pengelola tercantum dalam Undang-undang tetapi sanksi bagi yang tidak membayar zakat tidak ada. Alangkah lebih bagusnya jika Undang-Undang No. 38 tahun 1999 ada refisi dan dicantumkan dalam Undang Undang tersebut sanksi bagi yang tidak membayar zakat dan adanya kekuatan untuk memaksa bagi yang enggan membayar zakat, sebagaimana pendapat imam Syafi'i.

Dalam Undang-Undang diatur pula pembayaran zakat sekaligus pajak. Artinya bagi masyarakat yang telah membayar zakat maka pembayaran zakatnya akan dikurangi sejumlah zakat yang telah dibayarkan. Hal ini merupakan kebijakan jalan tengah yang diambil oleh pemerintah yang sangat memadai dan dapat diterima.

Pengumpulan zakat yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 38 tahun 1999 menerangkan bahwa kinerja *Amil* (petugas zakat) tidak sebatas mengumpulkan zakat tetapi juga menangani masalah infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan waris. Hal ini sesuai dengan semangat alkhulafa ar-Rasyidin dalam mengumpulkan harta zakat untuk

perhitungannya dengan mencatat mengelompokkan mereka berdasarkan kelompok masing-masing.

Dalam Undang-Undang pasal 16 ayat 2 dikatakan bahwa Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tidak menjadikan masalah apabila kebutuhan konsumtif para *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) telah terpenuhi. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif merupakan pemanfaatan uang pada BAZ yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Mungkin karena berlebihnya uang zakat atau salah satu asnaf tidak ada.

Penulis sependapat dengan pendayagunaan zakat untuk usaha yang produktif apabila semua asnaf telah tercukupi kebutuhannya.

Lahirnya Undang-Undang zakat No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini diharapkan akan dapat memberikan pemahaman baru tentang zakat yang selama ini masyarakat hanya memahami petugas zakat hanya menerima dan mendistribusikan zakat.

Meskipun masih banyak ketidakjelasan mengenai aturan secara jelas yang disebutkan hanya mengacu pada hukum agama, tidak menjadikan Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan kemudian menganalisis Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sistem pengelolaan zakat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dilihat dari pengelolaan zakatnya, sebagaimana diatur dalam bab III bahwasannya pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. dan Undang-Undang tersebut mempunyai kekuatan hukum.
2. Pengelolaan zakat menurut Imam Syafi'i mengenai pengambilan secara paksa bagi orang yang telah wajib membayar zakat akan tetapi tidak mau mengeluarkannya Imam Syafi'i dan para ulama sepakat untuk dijatuhi hukuman kufur karena mereka ingkar terhadap kewajiban. Orang yang ingkar membayar zakat bisa dijatuhi hukuman penjara sebagai suatu upaya untuk mendidik agar menjalankan perintah agama.
3. Dari analisis bahwa pengumpulan zakat yang diatur oleh Undang Undang para petugas harus mempunyai inisiatif untuk mengambil zakat dari *Muzakki* (orang yang berzakat) apabila mereka sudah mencapai haul dan nisab, jangan menunggu pemberitahuan dari mereka, pemerintah memiliki ketegasan hukum atau sanksi bagi yang enggan membayar zakat.

Hadirnya Undang-Undang pengelolaan zakat juga memberikan spirit agar pengelolaan zakat tersebut ditangani oleh Negara seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah, zakat ditangani oleh wali (pemerintah). Lahirnya Undang-Undang zakat No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini diharapkan akan dapat memberikan

pemahaman baru tentang zakat yang selama ini masyarakat hanya memahami petugas zakat hanya menerima dan mendistribusikan zakat.

B. Saran

Zakat merupakan aturan agama, yang telah diwajibkan secara personal bagi umat Islam yang mampu melakukannya. Akan tetapi dalam implementasinya mekanisme zakat mulai dari harta yang wajib dizakati, waktu pembayarannya, siapa yang berhak menerima, harta yang wajib dizakati dan sebagainya, dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat dalam penetapannya. Oleh karena itu Undang-Undang ini dapat dikaji kembali, untuk bisa mempertegas aturan agama yang mana dan seperti apa yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Diharapkan kepada para tokoh agama agar memperhatikan betapa pentingnya zakat tersebut. Begitu juga kepada pemerintah supaya lebih tegas lagi dalam menangani masalah zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), cet.ke 3
- Asy- Assyafi'i. *Terjemahan al-Umm*, (Semarag : CV. Asifa', 1997), cet. ke 1
- Asy-Syafi'i.R.A - al-Imam. *terjemahan al-Umm*, (Malaysia : Victory Agencie, 1989), cet. ke1
- Asy Sarqawi, Abdurrahman. *Riwayat 9 Imam Mazhab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet.ke 1
- Ach Khudori. Soleh. *Fikih Kontekstual*, (Jakarta: PT Pertaja, 1999)
- Abu Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Umm*, (Jakarta : Pustaka Azam,2005), cet ke 1
- Ahmad Syurbasi, *al-Aimmatutul Arba'ah*, terj. Sabil Hud, H A. Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara 1991), cet. ke 2
- Asy Syarqawi, Abdurrahman. *Terj. Lima Mazhab Terkemuka*, (Bandung : al-Bayan, 1994), cet. ke 4
- Basri, Hasan. Ketua Umum MUI. *Zakat dan Pajak*, (Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, 1991), cet. ke 1
- Chalil, *Biografi empat serangkai Imam Mazhab hanafi, Maliky, Syafi'i Hanbali*, (Jakarta: Bulan Bintang 1996),cet.ke 1
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, Buku 1, (Jakarta : Proyek pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982), cet. ke 1
- Departemen Agaa RI. *al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandug : Sinar Baru Algensindo, 2006), cet. ke 1
- Gusfahmi. *Pajak menurut Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2007), cet. ke 2

- Husain Ahmad Amin. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung, PT. Rosa Karya, 1999), cet. ke 4
- Hasan. *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: raja grafindo persada.1995), cet. ke 3
- Huzaimah tahido yangga, *Pengantar perbandingan mashab*, (Jakarta : logos,1997), cet. ke-1
- Hadi, Permono, Sjechul.*Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), cet.ke 1
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Pt. Gramedia, 2007), cet.ke 1
- M. Ali hasan. *Masail Fiqih*. (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2003), cet. Ke 2
- M. Jawab, Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentara, 2001), cet.ke7
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Menejemen Zaka*, (Jakarta: Kencana,2006), cet. ke 1
- Muhyiddin, Abdussalam, *Muakif Imam Syafi'i Min Madrasath al- Iraq al-Fiqhiyyah*.terj Mahrus Muslim, (Jakarta: Fika hati Anesta,1995)
- Mursyidin.*Akuntans Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2006), cet. ke-3
- M. Nashiruudin al-Albani . *Ringkaasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gem Insani, 2005). cet. ke 1
- Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Gema Insani, 1997)cet. ke- 1
- Qardawi, yusuf. *Terjemahan Hukum Zakat*, (Bogor:Litera Nusantara, 1999),cet. ke 5
- _____ *Terjemahan Ibadah Dalam Islam*,(Jakarta : Akbar, 2005),cet. ke 1

_____ *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1991), cet. ke 2

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, (Libanon :al-Fikri : 1981), cet.ke 1

_____ *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Gramedia, 1985), cet.ke 1

Syaifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), cet.ke 1

Sirajuddin Abbaz, *Sejarah Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah 1995), cet. ke 7

UU RI No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, (Yogyakarta : Pustaka Yustasia, 2009)cet. Ke 1

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqih*, (Jakarta : PT.Toko Gunung, 1994), cet. ke 7